

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI AKIBAT
PENGHAPUSAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**KHOIRUN NAJA
NIM : 145010100111112**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI AKIBAT
PENGHAPUSAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

KHOIRUN NAJA
NIM:145010100111112

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 09 Oktober 2018 dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD.
NIP. 196611 1219890 3 2001

Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 197409 0920060 4 1002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 26 September 2018

Yang menyatakan,

Khoirun Naja
NIM 145010100111112



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat sampai ke tahap penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang ini. Tak lupa, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, waktu, kesabaran, dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
5. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Munawir dan Ibu Mahmudah. Kakak dan Adik penulis, Bahrur Rosyid dan A'immatatus Sholihat. Kakak ipar penulis Mbak Tya serta keponakan pertama penulis, Zahra. Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti yang diberikan kepada penulis.
6. Keluarga Besar LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Manifest FH UB. Terimakasih atas canda, tawa, serta proses yang telah diberikan kepada penulis.
7. Keluarga Besar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum Brawijaya dan Angkatan 2014 "KRISPI". Terima kasih telah mengajarkan arti persaudaraan dan perjuangan kepada penulis.
8. Keluarga Besar PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia) Kota Malang. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan ilmu yang berharga dalam masa pengurusan yang penulis ikuti.
9. Teman-teman penulis dalam grup "Masuk Keluar Bareng". Terima kasih telah memberikan warna kepada kehidupan perkuliahan penulis dari awal maba hingga akhir masa perkuliahan ini.
10. Teman-teman penulis angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sejak awal maba yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman kontrakan penulis "Anggrek Vanda Squad", yaitu: Yogi, Afrida, dan Fajar. Terima kasih atas canda, tawa, serta dukungannya kepada penulis.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 26 September 2018

Khoirun Naja



RINGKASAN

KHOIRUN NAJA, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten**, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (Selanjutnya disebut UU Paten). Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Di dalam UU Paten Tahun 2016 tersebut terdapat ketentuan mengenai penghapusan paten. Akibat dari penghapusan paten tersebut adalah hilangnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut. Hilangnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten tersebut tentu juga menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi paten. Perjanjian lisensi menjadi sangat penting dalam hal pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten. Hapusnya paten berakibat juga pada hapusnya perjanjian lisensi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi melalui ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi.

Penulis ingin menganalisis apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari penghapusan paten bagi penerima lisensi serta apa saja elemen-elemen penting yang harus ada dalam perjanjian lisensi untuk melindungi penerima lisensi dari akibat hukum penghapusan paten. Untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat penulis, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari penghapusan paten memiliki akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari alasan penghapusan paten yang digunakan. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah dalam membuat perjanjian lisensi haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas perjanjian yang berlaku, memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, memperhatikan isi dari perjanjian lisensi dengan membuat klausula yang dapat menyelamatkan penerima lisensi dari akibat hukum penghapusan paten yang ditimbulkan, serta cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih apabila suatu saat terjadi sengketa.

SUMMARY

*KHOIRUN NAJA, Law of Business and Economy, Faculty of Law Universitas Brawijaya, September 2018, **Legal Protection for a Licence Holder due to Patent withdrawn according to Act Number 13 of 2016 on Patent**, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.*

Patent as in Act Number 13 of 2016 is defined as an exclusive right given by a state to an investor for his/her invention in technology in terms of inventing on his/her own or approving another party to execute the result of invention.

Patent withdrawing is regulated in the Act of 2016 concerning Patent. Patent withdrawing leads to lifting all legal consequences regarding the patent itself and things related to the patent, which surely harms the patent holder. Agreement over licence is crucial in terms of giving rights and gaining economic benefits of the patent. Patent withdrawing means that the license is gone as well. Therefore, legal protection for licence receiver is required through provisions of licence agreement.

This research is aimed to analyse the legal consequences caused by patent withdrawing that affects the licence holder and to find out types of essential elements that must be present in the licence agreement to protect licence holder from legal consequences due to patent withdrawing. This research involved juridical normative method with statute approach.

The research results reveal that legal consequences caused may vary depending on the reasons behind the patent withdrawing. It is essential to understand that license agreement making must be based on principles of agreement that apply, must not overlook the rights and obligation for all parties involved, must take into account the substance of licence agreement by making the clause to protect the licence holder from consequences caused by patent withdrawing, and must consider resolution in case of any dispute taking place.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum	12
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	14
1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	14
2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual	17
D. Tinjauan Umum Tentang Paten	18
1. Sejarah Paten	18
2. Subjek Paten	21
E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi.....	22
1. Lisensi Paten	23
F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	24
1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya	24
2. Unsur-Unsur Perjanjian	25
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	26
4. Syarat Sahnya Perjanjian	27
5. Perjanjian Lisensi	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	31
D. Sumber Bahan Hukum	32
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	32
F. Teknik Analisa Bahan Hukum	32
G. Definisi Konseptual	33



BAB IV PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.....	35
1. Analisis Mengenai Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016	35
2. Analisis Terhadap Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016	38
2.1 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten disebabkan oleh Permohonan Pemegang Paten yang dikabulkan Oleh Menteri	38
2.2 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten disebabkan oleh Putusan Pengadilan	40
2.3 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Putusan Komisi Banding Paten atau Pemegang Paten Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Biaya Tahunan	45
B. Elemen-Elemen Penting Dalam Perjanjian Lisensi Yang Dapat Melindungi Pemegang Lisensi Akibat Penghapusan Paten Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	47
1. Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat Perjanjian	47
2. Perjanjian Lisensi Yang Baik.....	51
2.1 Bentuk Dari Perjanjian Lisensi	53
2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi	56
2.3 Klausula yang dibutuhkan dalam Perjanjian Lisensi Guna Melindungi Penerima Lisensi dari Penghapusan Paten Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	58
3. Penyelesaian Sengketa atas Paten yang Telah Dihapuskan	63
3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	66
3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Orisinalitas Penelitian	7
---	---



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Negara hukum yang dimana setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan hukum yang telah diatur¹. Oleh sebab itu setiap perbuatan di segala aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia haruslah diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil kreasi, pikiran dan suatu desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pikiran, kreasi, dan suatu desain tersebut dapat diperjual belikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut.²

Hak atas Kekayaan Intelektual atau juga dikenal dengan HAKI merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu *Hak, Kekayaan, Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun *Kekayaan Intelektual* merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni,

¹ Ni'matul Huda, **Ilmu Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 8

² Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 215

sastra gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/Kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.³

Salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai teknologi adalah paten. Paten dan oktroi (istilah bahasa Indonesia), *patent* (Bahasa Inggris), *octrooi* (Bahasa Belanda), di sini diartikan: suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya (*de rechtverkrijgende*), atas permintaannya yang diajukannya kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas yang sudah ada, cara bekerja baru, perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu. Dasar pemberian paten kepada si pendapat adalah berdasarkan pada keadilan dan kelayakan jerih payah, sehingga patutlah ia memperoleh hak paten.⁴

Ketentuan mengenai Hak Paten sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Seiring dengan perkembangan zaman undang-undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlangsung hingga sekarang. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Dalam pasal 1 undang-undang paten tersebut antara lain disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan:⁵

³ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 38

⁴ Ibid, hlm 65

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Dengan demikian, Paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada seorang penemu atau berapa orang (inventor) yang harus dimohonkan kepada negara, khususnya penemuan atau ide di bidang teknologi, temuan yang sifat menyempurnakan temuan yang sudah ada atau perbaikan baru atas cara kerja, untuk selama jangka waktu tertentu.⁶

Pemegang paten selain dapat menggunakan invensinya sendiri juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Izin tersebut dapat berupa lisensi. Jika dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pengertian lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam

⁶ Zaeni Asyhadie, op.cit. hlm 256

jangka waktu dan syarat tertentu.⁷ Pihak yang mendapatkan izin menggunakan paten tersebut dapat disebut sebagai pemegang lisensi atau penerima lisensi.

Di dalam peraturan baru tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terdapat ketentuan hukum terkait penghapusan paten. Penghapusan paten terdapat dalam BAB XII PENGHAPUSAN PATEN. Alasan penghapusan paten terdapat dalam Pasal 130, yaitu:

“Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan”

Sedangkan akibat dari penghapusan paten terdapat dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain lain yang berasal dari Paten tersebut.”

Artinya, jika paten tersebut dihapuskan maka ada para pihak yang akan dirugikan yaitu pemegang paten dan penerima lisensi karena hak-hak atas paten yang dihapuskan telah hilang. Salah satu contoh permasalahan dalam

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

paten adalah adanya suatu invensi paten yang dianggap tidak mempunyai nilai kebaruan. Sehingga ada pihak yang menggugat paten tersebut karena penggugat merasa invensi patennya telah dijiplak. Gugatan tersebut menuntut agar paten dihapuskan. Pada akhirnya dapat mengakibatkan pada penghapusan paten. Selain menggugat pihak yang invensi patennya tidak memiliki nilai kebaruan, para penerima lisensi dari paten yang digugat juga dapat ikut tergugat. Maka, diperlukan suatu perlindungan bagi para penerima lisensi.

Perjanjian lisensi berperan penting dalam hal pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten. Penghapusan paten tersebut juga berakibat pada hapusnya perjanjian lisensi yang dibuat. Kondisi ini menyebabkan penerima lisensi dalam posisi lemah dan kehilangan hak-haknya dalam perjanjian lisensi yang dibuatnya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap penerima lisensi dari akibat penghapusan paten yang merugikan melalui ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lisensi yang dibuat. Para pihak dalam perjanjian lisensi dapat mengatur kesepakatan diantara kedua belah pihak tanpa harus mengacu pada Undang-Undang yang ada, karena dalam sebuah perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak.

Disini penulis ingin memberikan salah satu contoh kasus penghapusan paten yang ada di Indonesia. Sebagai contoh kasus yang terjadi antara Kubu Poltak Sitinjak dengan PT Rajawali Parama Konstruksi. PT Rajawali Parama Konstruksi (RPK) mengajukan gugatan penghapusan paten instalasi pompa vertical line untuk pompa condenser dan pompa chiller milik Poltak Sitinjak di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. RPK menilai, paten milik Poltak itu tidak

memiliki kebaharuan dan tidak mengandung langkah inventif. Kuasa hukum RPK dari kantor hukum Suryomurcito & Co dalam berkas yang diterima KONTAN, Rabu (4/1) menyebut, paten milik Poltak hanya merupakan penggabungan antara unit pompa, pipa, dan katup kombinasi dengan fitur standar dan diatur instalasi pompa. Maka dari itu RPK mengajukan gugatan balik terhadap Poltak lantaran ingin membuktikan invensi patennya itu tidak sah karena tidak memiliki nilai kebaruan. Dengan begitu, Pasal 146 ayat 5 dan Pasal 152 ayat 5 UU Paten tidak terpenuhi maka paten milik Poltak haruslah dihapuskan.⁸

Dari contoh kasus penghapusan paten di atas. Dapat dipastikan terdapat juga pihak yang memegang lisensi atas paten yang dihapuskan. Lalu bagaimana nasib dari para penerima lisensi yang patennya telah dihapuskan tersebut? Bagaimana perjanjian lisensi antara pemegang paten dengan penerima lisensi? Apakah perjanjian lisensi yang telah dibuat sudah cukup baik untuk melindungi para pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat adanya penghapusan paten. Maka, perlindungan hukum dan status penerima lisensi pasca paten tersebut dihapuskan haruslah diperhatikan.

Persoalan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti bagi perkembangan ilmu hukum. Bagaimana kemudian negara memberikan perhatian dan perlindungan terhadap objek kajian tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi para penerima lisensi pasca paten dihapuskan dan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi, sehingga para penerima lisensi atas hak paten memiliki kepastian hukum atas lisensi yang

⁸ <http://nasional.kontan.co.id/news/rajawali-parama-gugat-paten-pompa-milik-poltak> diakses pada 1 April 2018

telah mereka dapatkan. Sehingga timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul.

“(PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA LISENSI AKIBAT PENGHAPUSAN PATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN)”

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbandingan
1.	Lena Griswanti (Universitas Gadjah Mada, 2005)	Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten di Indonesia	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi dalam perjanjian lisensi paten di Indonesia dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang paten dan prinsip umum hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia?	Penelitian ini menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten menggunakan UU Paten yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah berfokus pada bagaimana membuat perjanjian lisensi yang dapat memberi perlindungan hukum bagi pemegang lisensi apabila patennya dihapuskan.
2.	Valentino M. Demmassabu (Universitas Sam Ratulangi, 2013)	Penghapusan Lisensi Paten Oleh Pemegang Hak Paten Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten	1. Bagaimanakah perlindungan Hukum Terhadap lisensi paten menurut UU No. 13 tahun 2016? 2. Bagaimanakah penghapusan Paten serta akibat hukumnya terhadap pemegang Lisensi paten menurut UU No. 13 Tahun 2016?	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hukum terhadap lisensi paten menurut UU No. 13 tahun 2016 dan bagaimana penghapusan Patenserta akibat hukumnya terhadap penerima Lisensi paten menurut UU No. 13 Tahun 2016. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan berfokus pada bentuk perjanjian lisensi paten sebagai perlindungan hukum bagi penerima lisensi apabila terjadi penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

B. Rumusan Masalah

1. Apa implikasi yuridis bagi penerima lisensi akibat penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ?
2. Apa elemen-elemen penting dalam perjanjian lisensi yang dapat melindungi penerima lisensi akibat penghapusan paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implikasi yuridis dari penghapusan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji elemen-elemen dalam perjanjian lisensi yang dapat melindungi penerima lisensi dari akibat penghapusan paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan, diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu hukum di bidang HKI. Sedangkan secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum Penerima Lisensi di Indonesia akibat penghapusan paten serta bagaimana perlindungan hukum penerima lisensi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penerima Lisensi

Penerima lisensi dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman jika terjadi penghapusan paten atas paten yang telah dilisensikannya.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi Undang-Undang Paten khususnya dalam hal penghapusan paten.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan penambah wawasan hukum di bidang HKI khususnya di bidang paten.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian, yang dimana teori-teori dalam kajian pustaka akan digunakan sebagai bahan analisa penulis untuk rumusan masalah yang telah disajikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

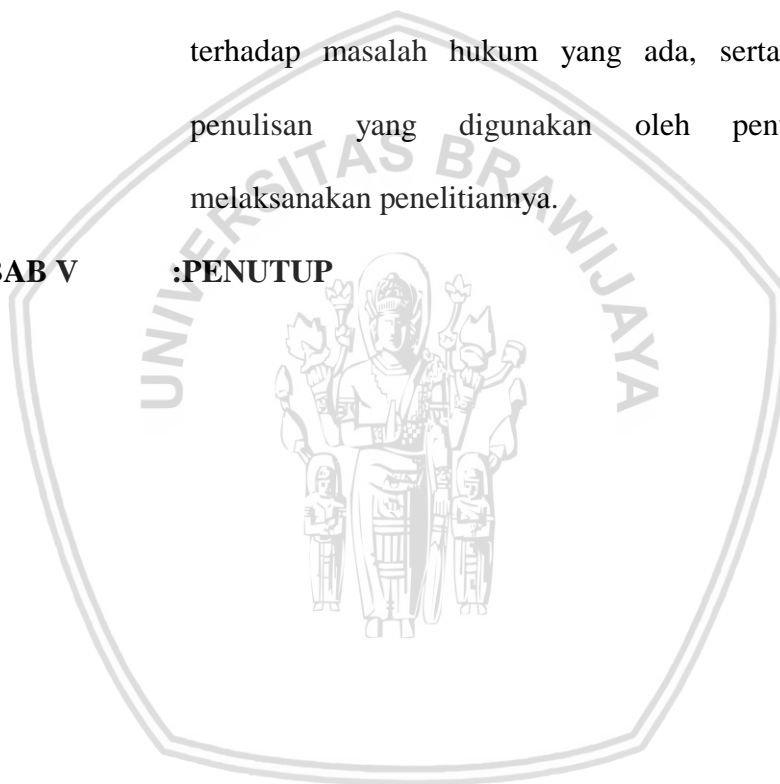
Metode Penelitian memuat jenis penelitian yang digunakan, bagaimana penelitian dilakukan, pendekatan

penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya.

BAB IV : PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam pembahasan akan menguraikan tentang analisis terhadap masalah hukum yang ada, serta sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitiannya.

BAB V :PENUTUP



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, maksud dari pasal tersebut adalah dalam penyelenggaraan suatu negara dalam segala bidang haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah itu di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain, dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan bersifat *preventif* dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat *represif* kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk

⁹ Satjipto Raharjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Masalah-masalah Hukum**, No. 1-6 Tahun X/10, 1993, hlm 10.

yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemberian hibah, nikah dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur-unsur perbuatan hukum adalah perbuatan dilakukan oleh subjek hukum, perbuatan itu mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Perbuatan hukum terdiri atas dua jenis yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak, luar kawin, dan sebagainya.
- b. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dengan demikian, perbuatan hukum berbeda dengan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007, hlm 2.

¹¹ Amiruddin Pabbu dan Syamsuddin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hlm 51.

oleh objek hukum, karena perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan oleh subjek hukum dan akibatnya tidak dikehendaki.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.

Atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hukum.

Contoh:

1. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli.
2. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain.

Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.

Akibat hukum itu dapat berwujud:¹²

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh:

- a. Umur 21 tahun menjadi cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

¹² Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 87.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contoh:

Ahmad mengadakan perjanjian jual beli dengan Bujang, maka lahir lah hubungan hukum antara Ahmad dengan Bujang. Apabila sudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan melawan hukum.

Contoh:

Seorang pembunuh diberi sanksi pidana adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pembunuh tersebut, karena telah menghilangkan nyawa orang lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukanlah suatu hal yang baru di kehidupan sosial masyarakat pada era digital seperti ini. Pada dasarnya HKI sudah muncul dasar pemikirannya sejak abad ke-4 SM. Landasan filosofi HKI dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristotle.¹³ Di Eropa, pengakuan secara internasional terhadap HKI baru diperkenalkan pada abad 18. Pada abad ke 18 di Inggris baru muncul pengertian si pencipta adalah yang berhak atas karyannya sendiri. Sedangkan

¹³Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1

di Perancis, pengakuannya baru muncul setelah dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1971.¹⁴

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Kemudian Pemerintah Belanda mengundangkan:¹⁵

1. UU Merek Tahun 1885
2. Undang-Undang Paten Tahun 1910
3. UU Hak Cipta Tahun 1912

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1946, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Selanjutnya secara berturut-turut pemerintah hingga kini mengeluarkan kebijakan yang menyangkut HAKI. Meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, dsb.

2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,

¹⁴ Syahmin AK, **Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 133.

¹⁵ Zaeni Asyhadie, Op.cit. hlm, 216.

seni, dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi. Karya – karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorban tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi / ilham / hati / nurani. HKI merupakan hak privat dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusifnya kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut.¹⁶

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *intellectual property right* (IPR) yang berbeda dengan *real property*.¹⁷

World Intellectual Property Organization atau dikenal dengan singkatan WIPO, merumuskan *intellectual property* sebagai hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan,

¹⁶ Iswi Hariyani. **Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm 16.

¹⁷ Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 4.

industri, kesusastraan, dan seni. Ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intellectual seperti dirumuskan oleh WIPO memiliki suatu pengertian yang luas dan mencakup karya kesusastraan, pertunjukan oleh para artis, ilmu pengetahuan (*scientific*), penyiaran audio visual artistik, penemuan ilmiah.¹⁸ Menurut *World Intellectual Property Organization*, HKI dapat dijadikan dua golongan besar yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri.¹⁹ Paten adalah salah satu dari hak atas kekayaan industri.

3. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Cabang HKI secara umum mengacu pada TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) yaitu perjanjian yang mengatur tentang ketentuan HKI di bawah WTO (*World Trade Organization*). Beberapa elemen pokok perlindungan menurut TRIPs ada 7 (tujuh) cabang, antara lain:

1. Hak cipta (*copyrights and related rights*)
2. Merek dagang (*trademark*)
3. Indikasi geografis (*geographical indicator*)
4. Desain industri (*industrial design*)
5. Paten (*patent*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
7. Informasi tertutup (*protection of undisclosed information*)

Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (www.dgip.go.id).²⁰

¹⁸Zainal Asikin, **Hukum Dagang**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm 123.

¹⁹Ibid., hlm 124.

²⁰Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam**, UIN-Maliki Press, 2013, hlm 4.

D. Tinjauan Umum Tentang Paten

1. Sejarah Paten

Secara historis, pengaturan paten dimuat dalam undang-undang HAKI pertama kali di Venice, Italia pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.²¹

Baru pada abad ke-16, diadakan peraturan pemberian hak paten/oktroi bagi hasil-hasil pendapatan (*uitvinding*), yaitu negara-negara Venesia, Inggris, Belanda, Jerman, Austria, dan lain-lain negara. Hak paten atau oktroi itu bersifat sebagai semacam “izin menetap”. Jadi, berbeda dengan pemakaian pengertian materiil istilah itu pada dewasa ini.²²

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (*inventions*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan.

Sama halnya dengan hak cipta, kebutuhan perlindungan hukum bagi penemuan di bidang teknologi tersebut juga berakar pada sejarah yang cukup lama. Pada awalnya memang sekadar perlindungan yang bersifat monopolistik, dan memperoleh wujud yang jelas pada abad ke-14.

²¹Asep Herman Suyanto, *Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Dunia Pendidikan*, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 19 Juli 2018

²²Adrian Sutedi, *Op.cit.* hlm 64

Teknologi ini sangat penting, karena merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan perkembangan industri. Sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri, teknologi jelas lahir dari kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari segi nilai, kegiatan penemuan teknologi dan pengembangannya, selalu melibatkan tenaga dan pikiran serta waktu dan juga biaya yang biasanya sangat besar.

Karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya, maka teknologi akan memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh karena sebab itu, wajar apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum.²³

Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HKI). Sebelum tahun 1945, paten diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial Belanda, *Octrooiwet* 1910. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1979 Indonesia meratifikasi perjanjian WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya pada tahun 1983, Indonesia masuk menjadi anggota Paris Convention. Pada tahun 1989 DPR mengesahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah memperbarui UU Paten menjadi UU No. 14 Tahun 2001.²⁴ Pada tahun 2016, pemerintah kembali memperbarui UU Paten menjadi UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Hal tersebut dilakukan karena UU Paten sebelumnya

²³Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 195.

²⁴Khoirul Hidayah, Op.cit. hlm 140.

dianggap sudah tidak layak dan tidak mengikuti perkembangan hukum yang berlangsung saat ini.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang dimaksud dengan:²⁵

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang pada awalnya berasal dari kata *patere* yang memiliki arti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Kemudian dari definisi kata paten tersebut, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan. Hal ini demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu.²⁶

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

²⁶ Zainal Asikin, op.,cit, hlm.134

Suatu *invention* adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk proses. Hak atas kekayaan intelektual berupa ide atau pikiran yang dapat dilindungi hukum harus bersifat *patentable*, yakni baru, *applicable* dan *inventive step*.²⁷

Sedangkan menurut WIPO, paten didefinisikan sebagai berikut:²⁸

A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.

Merujuk pada definisi menurut WIPO di atas, bisa dipahami mengenai unsur penting dari Paten, yaitu bahwa paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat eksklusif. Perbuatan-perbuatan yang merupakan hak eksklusif dari si Pemegang Hak Paten adalah produksi dari barang yang dipatenkan (manufacturing), penggunaan (using), dan penjualan (selling) dari barang tersebut, dan lain-lain perbuatan yang berhubungan dengan penjualan barang (paten) misalnya mengimpor dan menyimpan (stocking).²⁹

2. Subjek Paten

Ketentuan mengenai subjek paten dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 (Pasal 1 angka 1) bahwa yang berhak menerima paten adalah inventor atas invensinya ataupun memberikan izin kepada pihak lain

²⁷ Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 27.

²⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intellectual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 161.

²⁹Ibid.

untuk melaksanakannya. Menurut pengertian dalam Pasal 1 angka 3 UU Paten, inventor diartikan sebagai berikut:

“Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.”

Kemudian ketentuan tersebut juga memberikan penekanan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu, misalnya, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain, yang berhak memperoleh paten atas penemuan atau invensi yang bersangkutan. Apabila suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka 3 UU Paten di atas, maka secara bersama-sama juga mereka berhak memperoleh hak atas penemuan paten tersebut.³⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Lisensi

Banyak tulisan atau sumber dalam banyak buku terhadap aspek HaKI yang satu ini. Lisensi yang berkaitan dalam HaKI ini termasuk di antaranya lisensi terhadap hak paten, merek dagang/jasa, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sebelum negosiasi dimulai, para pihak harus ada persamaan persepsi atas apa yang disebut dalam *short agreement* yang mereka inginkan. Sejak sebuah perjanjian/kontrak lisensi secara normal berlaku maka terjadi sebuah hubungan balik antara penerima lisensi (*licensee*) dan pemberi lisensi (*licensor*).³¹

Lisensi adalah pemberian oleh pemilik dari penemuan paten kepada orang atau badan hukum dengan izin untuk melakukan di suatu negara dan

³⁰Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 198.

³¹Suyud Margono dan Amir Angkasa, Op.cit. hlm 59.

dalam batas waktu tertentu, satu atau lebih suatu tindakan mencakup hal-hak eksklusif dari pemilik penemuan paten di negara tersebut.

Pada saat izin diberikan, sebuah lisensi telah diakui. Hal ini mungkin dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah:

1. Dibuat atau digunakan untuk produk yang termasuk dalam penemuan tersebut.
2. Membuat produk melalui proses yang termasuk di dalam penemuan; atau
3. Menggunakan proses yang terlingkup dalam penemuan.³²

1. Lisensi Paten

Berdasarkan sebuah lisensi paten, tujuan dari sebuah kontrak legal adalah memberikan otorisasi perlindungan untuk menggunakan sebuah penemuan yang telah mendapat perlindungan HaKI melalui paten. Paten melibatkan sebuah identifikasi dengan menyebutkan nama negara tempat paten tersebut diberikan. Umumnya, masalah teknis dari penemuan disebutkan secara singkat dalam pembukaan atau klausul yang digunakan dalam kontrak.

Sebuah paten memperoleh sebuah paket hak eksklusif, yaitu menggunakan, memproduksi, dan menjual dan atau menaruhnya dalam pasar. Umumnya sebuah lisensi menyediakan sebuah otorisasi kepada *licensee* untuk melaksanakan semua tindakan-tindakan tersebut. Sebuah lisensi dapat berupa lisensi eksklusif atau sebuah atau lisensi yang sederhana. Sebuah lisensi eksklusif menjamin bahwa sebuah lisensi tidak ada kompetitor dalam

³²Ibid, hlm 121.

menjalankan lisensi tersebut. Ini semua harus disebutkan dalam perjanjian. Sebuah lisensi eksklusif menjamin bahwa *lincensor* tidak akan memperbolehkan lisensi kepada manufaktur lain dalam wilayah yang sudah disepakati. Sebuah sampel lisensi akan menyatakan bahwa tidak akan ada jaminan dalam kaitan tersebut terhadap hak-hak yang bersifat eksklusif, tetapi sebuah otorisasi untuk menggunakan invensi tersebut.

Dalam kasus tersebut, terekomendasikan apa yang termasuk dalam kontrak yang dikenal dengan prinsip “*most favored license clause*”. Klausul tersebut untuk meyakinkan bahwa seorang *license* akan menikmati kondisi yang menyenangkan dan konsekuensinya akan mendapatkan lisensi kedua (*second license*) untuk wilayah yang sama. Klausula ini selanjutnya menghindari distorsi dari kompetisi yang merupakan akibat dari kondisi pembedaan secara kontraktual untuk *supply of technology*.³³

F. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Istilah “Perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu *rechthandeling* yang artinya suatu perbuatan dimana oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian, suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak

³³Ibid, hlm 136.

yang mengikatkan diri didalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.³⁴

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi hukum perjanjian, sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.
2. M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuanikan prestasi.
3. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Adanya perjanjian harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat atau consensus. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Ada tiga unsur yang mendasar adalah yang pertama unsur yang mutlak harus ada dalam terjadinya perjanjian disebut *essentialia*. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur kedua adalah

³⁴ Ratna Artha Windari, **Hukum Perjanjian**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm 2.

yang lazim melekat pada perjanjian yaitu unsur *naturalia*. Unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.

Unsur ketiga adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian yang dinamakan *accidentalalia*. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih. Jadi perjanjian itu pada umumnya tidak dibuat secara formal tetapi konsensual. Inilah yang disebut asas konsensualisme salah satu asas hukum perjanjian. Dengan adanya persesuaian kehendak telah terjadi perjanjian.³⁵

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Asas-asas yang harus diperhatikan pada waktu membuat perjanjian maupun melaksanakannya adalah sebagai berikut:³⁶

a. Asas Konsensualisme

Asas yang dimana bahwasanya perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak.

b. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian

Asas yang dimana bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara: bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

c. Asas kebebasan berkontrak

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110

³⁶ Patrik Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 3

Orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan kontrak tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang yang akan dipakainya untuk perjanjian.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Diperlukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dari keempat syarat tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan yang dilakukan itu.³⁷

Syarat-syarat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁸

1. Kesepakatan Para Pihak

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

³⁷ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 17

³⁸ Ratna Artha Windari, *Op.cit.* hlm 18.

Kata “kecakapan” yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau para pihak yang dinyatakan dewasa oleh hukum. Ukuran dewasa menurut ketentuan KUH Perdata adalah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di dalam pengampuan (curatele), dan pada umumnya semua orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Adanya Objek atau Suatu Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun juga berupa tidak bebuat sesuatu.

4. Adanya Kausa/ Sebab yang Halal

Sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM (*Void/Null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa/sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak.

5. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi, agar penerima lisensi dapat melakukan suatu

bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat digunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual ataupun memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma tersebut adalah terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan juga doktrin (ajaran).³⁹ Alasan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena penulis hendak mengkaji tentang perlindungan pemegang lisensi terkait adanya penghapusan paten di dalam Undang-Undang Paten serta elemen-elemen penting apa saja yang harus ada dalam perjanjian lisensi untuk melindungi penerima lisensi dari akibat penghapusan paten.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

Pendekatan Perundangan-Undangan (Statute Approach)

Suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴⁰ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.⁴¹

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 302.

⁴¹ Ibid, hlm 248.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yakni berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Sedangkan bahan hukum primer yang digunakan dalam proposal ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁴³ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁴⁴

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku literatur hukum
2. Skripsi
3. Jurnal
4. Artikel dan makalah

⁴²Ibid, hlm 141.

⁴³ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hlm 47.

⁴⁴Ibid

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dalam melakukan penelitian dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensiklopedi, dan lain-lain.

D. Sumber Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini yang disebutkan di atas diperoleh dari:

1. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Perpustakaan Universitas Brawijaya;
3. Internet.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Reasearch*), berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isi dari penelitian ini. Sedangkan dalam pengumpulan bahan, penulis menggunakan studi dokumentasi (*Documentation Reasearch*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan isi materi penelitian ini.

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal

yang lain dalam suatu perundang-perundangan atau dengan undang-undang lain. Selanjutnya data tersebut diolah secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis dan sistematis sehingga dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan. Berdasarkan metode interpretasi sistematis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan pemegang lisensi dengan mendiskripsikan dan menganalisis serta mengkaji konsep yang tepat mengenai penghapusan paten dan akibat hukumnya. Sedangkan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap baku.

G. Definisi Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Pemegang Paten

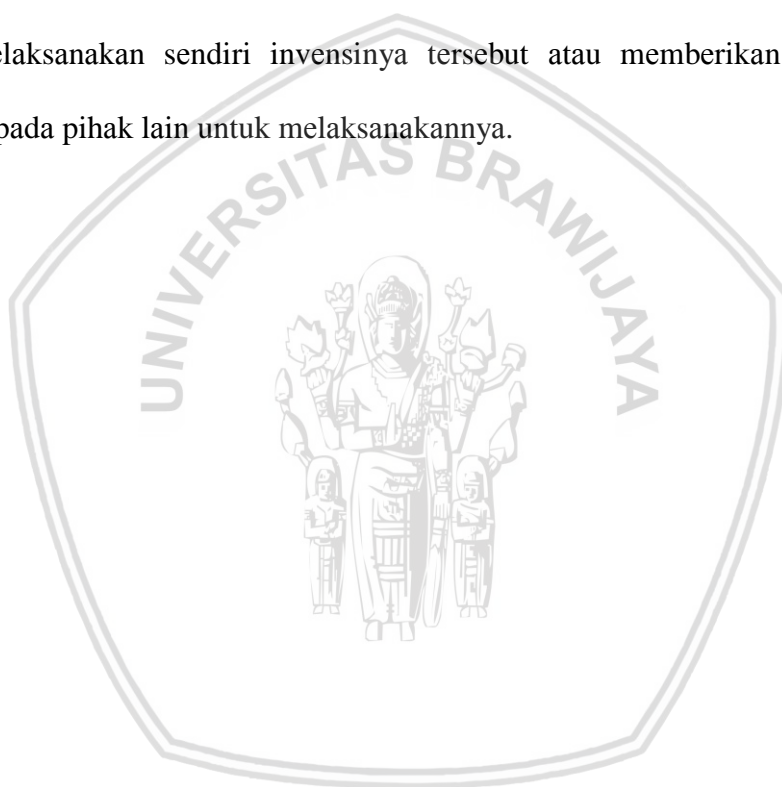
Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten.

c. Lisensi

Lisensi adalah hak yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada penerima lisensi dengan perjanjian tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan paten.

d. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

1. Analisis Mengenai Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

Hak Paten juga bisa disebut sebagai hak oktroi, hak ini sudah ada sejak abad ke-14 dan ke 15, yaitu di Italia dan di Inggris. Namun, pada waktu itu hak ini bukan ditujukan untuk suatu pendapatan, namun ditujukan kepada para ahli dari luar negeri untuk mengembangkan keahliannya. Maksudnya untuk menarik para ahli dari luar negeri untuk datang ke negeri yang mengundangnya untuk mengembangkan ilmunya guna untuk kemajuan penduduk negara yang bersangkutan.⁴⁵ Sesuai dengan perkembangan zaman hak paten juga melalui perubahan-perubahan yang pada akhirnya hak paten ditujukan untuk bagi hasil-hasil pendapatan. Indonesia adalah salah satu negara yang sudah mempunyai pengaturan tentang hak paten. Pada awalnya hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, sesuai dengan perkembangan zaman UU tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Maka, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU baru sebagai pengganti UU Paten yang lama sebagai upaya perlindungan hukum atas keseluruhan yang berhubungan dengan hak paten. UU terbaru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Menurut pengertian Undang-Undang Paten terbaru Paten adalah hak

⁴⁵Adrian Sutedi, Op. Cit, hlm 63.

eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴⁶ Paten adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi suatu invensi atau penemuan di bidang teknologi.

Terdapat beberapa pihak dalam kaitannya dengan paten, yaitu: Inventor, pemegang paten, dan penerima lisensi.⁴⁷

1. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
2. Pemegang paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
3. Penerima Lisensi adalah pihak yang mendapatkan izin dari pemegang paten untuk menggunakan paten berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif.

Ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban.

⁴⁶Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

⁴⁷Pasal 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terdapat ketentuan baru, yaitu terkait penghapusan paten. Penghapusan paten ini diatur dalam pasal 130 sampai dengan pasal 141. Penghapusan paten ini merupakan suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani paten-paten yang bermasalah. Akibat dari penghapusan paten tersebut adalah menghilangkan segala akibat hukum yang timbul dari pendaftaran paten. Hal ini tentu saja akan berakibat pada pemegang paten dan penerima lisensi karena hak-hak atas paten yang dihapuskan akan hilang.

Ada beberapa alasan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengapa suatu paten dihapuskan. Paten dapat dihapuskan sebagian maupun seluruhnya. Alasan tersebut terdapat dalam pasal 130, yang berbunyi:⁴⁸

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan Paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan Paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat penulis berpendapat bahwa ada empat alasan penghapusan paten, yaitu: penghapusan yang diajukan oleh pemegang paten itu sendiri, penghapusan yang dilakukan oleh pengadilan, penghapusan karena keputusan komisi banding paten, dan penghapusan

⁴⁸Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

dikarenakan tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan yang dibebankan kepada pemegang paten. Akibat hukum dari penghapusan ini dapat menghapuskan segala akibat hukum dan hal-hal lain yang berasal dari paten yang dimaksud.

2. Analisis Terhadap Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

2.1 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten disebabkan oleh Permohonan Pemegang Paten yang dikabulkan Oleh Menteri

Alasan penghapusan paten yang pertama terdapat dalam Pasal 130 huruf a, yaitu alasan penghapusan paten karena permohonan pemegang paten yang dikabulkan oleh menteri. Sedangkan pada Pasal 131 UU Paten menjelaskan mengenai alasan dan bagaimana mekanisme penghapusan paten yang diajukan kepada menteri. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa permohonan penghapusan paten haruslah diajukan secara tertulis.

Pihak yang mengajukan penghapusan paten tersebut haruslah pemegang paten itu sendiri terhadap sebagian atau seluruh klaim kepada menteri. Bila permohonan penghapusan sebagian klaim, maka disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim.⁴⁹ Permohonan penghapusan paten tersebut tidak dapat dilakukan apabila tidak mendapat izin dari penerima lisensi yang disertakan di dalam surat permohonan. Hasil dari keputusan penghapusan paten tersebut diberitahukan langsung oleh menteri kepada pemegang paten, penerima lisensi, atau kuasanya secara tertulis. Keputusan penghapusan

⁴⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten> diakses Pada 21 Mei 2017

tersebut dicatat dan diumumkan langsung oleh menteri melalui media elektronik maupun non elektronik. Penghapusan paten tersebut berlaku sejak ditetapkannya keputusan menteri.⁵⁰

Dari penjelasan pasal 131 tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya penghapusan paten tidak dapat dilakukan jika tidak mendapatkan izin tertulis dari penerima lisensi. Ketika penghapusan paten dengan ketentuan dalam pasal 131 telah dilaksanakan, maka penerima lisensi telah memberikan persetujuannya kepada pemegang paten untuk menghapuskan patennya. Disini penulis berpendapat bahwa persetujuan yang telah diberikan oleh penerima lisensi tersebut menandakan bahwa penerima lisensi telah mengetahui sebab-sebab dan akibat hukum yang timbul dari penghapusan paten tersebut, sehingga penerima lisensi memberikan izin kepada pemegang lisensi untuk menghapus patennya. Maka jelas penerima lisensi telah kehilangan hak-haknya atas paten yang telah dihapuskan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136. Pemegang paten dan penerima lisensi telah dibebaskan dari pembayaran biaya tahunan. Akibat hukum dari penghapusan paten dengan alasan permohonan dari pemegang paten bagi penerima lisensi adalah penerima lisensi sudah mengetahui dan menanggung segala akibat hukum yang akan terjadi, karena

⁵⁰ Pasal 131 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri. (2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud. (3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan Paten. (4) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada: a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan b. penerima Lisensi atau Kuasanya. (5) Keputusan mengenai penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik oleh Menteri. (6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.

penerima lisensi telah memberikan persetujuan kepada pemegang paten untuk mengajukan penghapusan paten kepada menteri. Penghapusan paten tersebut memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.

2.2 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Penghapusan Paten disebabkan oleh Putusan Pengadilan

Pada alasan kedua penghapusan paten dalam UU Paten Tahun 2016 adalah penghapusan karena putusan pengadilan. Alasan ini terdapat dalam pasal 130 huruf b. Sedangkan alasan-alasan apa saja yang membuat paten tersebut dihapuskan di pengadilan diatur dalam pasal 132. Dalam pasal 132 ayat 1 dijelaskan bahwa penghapusan paten melalui pengadilan dilakukan jika:⁵¹

- a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
- b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. Paten dimaksud sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invenisi yang sama;
- d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak

⁵¹Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau

- e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pada poin a dijelaskan bahwa paten yang terdapat dalam ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 9 seharusnya tidak diberikan. Pasal 3 menjelaskan sebuah invensi yang diberi paten dan paten sederhana haruslah mempunyai nilai kebaruan, pengembangan dari produk yang sudah ada, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.⁵² Pasal 4 menjelaskan tentang kriteria yang tidak mencakup invensi, yaitu: kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, dan temuan (discovery) berupa: penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau, bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.⁵³ Sedangkan pada pasal 9 menjelaskan tentang invensi yang tidak dapat diberi paten, invensi-invensi tersebut adalah:⁵⁴

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

⁵²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

⁵³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

⁵⁴Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologi.

Dari uraian pasal di atas penulis berpendapat apabila terdapat paten yang telah melanggar ketentuan yang dijelaskan dalam kriteria ketiga pasal tersebut, maka paten tersebut dapat diajukan penghapusan di pengadilan. Pengajuan penghapusan ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan.

Pada poin b pasal 132 menjelaskan tentang Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Ketentuan dalam pasal 26 adalah:⁵⁵

1. Jika Invenisi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.
2. Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah.
3. Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

⁵⁵Pasal 26 Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016

perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Alasan penghapusan paten dalam poin b ini dilakukan apabila ketentuan dalam pasal 26 tidak terpenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi harus disebutkannya dengan jelas dan benar asal atau sumber daya generik/ pengetahuan tradisional, harus ditetapkan oleh lembaga resmi dari pemerintah, dan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pengajuan penghapusan ini dapat diajukan oleh pihak ketiga yang dapat membuktikan asal muasalnya.

Pada poin c, alasan penghapusan paten dikarenakan paten yang dimaksud mempunyai indikasi kesamaan dengan paten lain sedangkan paten lain tersebut telah diberikan kepada pihak lain. Paten yang dimaksud berlaku untuk invensi yang sama. Gugatan ini hanya dapat diajukan oleh pemegang paten atau penerima lisensi yang merasa patennya telah dijiplak atau sama.

Pada poin d, alasan penghapusan paten disebabkan karena pemberian lisensi wajib ternyata tidak dapat mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten yang dapat merugikan kepentingan masyarakat selama dua tahun dihitung sejak lisensi wajib itu diberikan. Jika dirasa lisensi wajib tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang baik di masyarakat atau tidak dijalankan secara efektif dan malah mendatangkan dampak yang merugikan maka, paten tersebut dapat diajukan penghapusan. Pihak yang dapat mengajukan penghapusan tersebut adalah jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional.

Pada poin e, alasan penghapusan paten disebabkan karena tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 20. Merujuk pada pasal 20 tersebut pemegang

paten harus membuat produk dan menggunakan prosesnya di Indonesia. Pembuatan produk maupun proses tersebut harus dapat menunjang transfer teknologi, dapat menyerap investasi, dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Dari kriteria yang disebutkan di dalam pasal 20 tersebut apabila pemegang paten tidak dapat memenuhinya, maka dapat diajukan permohonan penghapusan paten pada pemegang paten yang bersangkutan.

Untuk alasan penghapusan pada ayat 1 huruf a dan b gugatan dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui pengadilan niaga. Pada alasan ayat 1 huruf c, gugatan penghapusan diajukan oleh pihak yang merasa patennya telah dijiplak agar paten yang sama tersebut dihapuskan melalui pengadilan niaga, sedangkan pada huruf d dan e gugatan dapat diajukan oleh jaksa dan pihak yang mewakili kepentingan nasional.

Pada ayat 1 huruf a dan b, paten dihapuskan setelah adanya gugatan dari pihak ke tiga. Alasan paten dihapuskan pada ketentuan pada huruf a dan b karena paten tersebut tidak memenuhi kriteria substantif paten. Akibat hukum dari penghapusan paten karena alasan pada huruf a dan b bagi penerima lisensi, yaitu penerima lisensi tidak dapat lagi menggunakan patennya, karena paten tersebut dianggap telah melanggar ketentuan UU Paten.

Pada huruf c, paten diajukan gugatan penghapusan karena paten tersebut dianggap sama dengan paten lain. Akibat hukum dari penghapusan paten karena alasan pada huruf c diatur dalam Pasal 139 dan 140. Menurut Pasal 139 penerima lisensi tetap dapat melaksanakan lisensi patennya sampai dengan berakhirnya waktu yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. Penerima lisensi dibebaskan dari pembayaran royalti, dan apabila pemegang

paten sudah menerima pembayaran royalti dari penerima lisensi, maka pemegang paten wajib mengembalikannya kepada pemegang paten yang berhak. Sedangkan pada pasal 140, penerima lisensi yang mendapatkan lisensi paten dengan itikad baik dari paten yang dinyatakan hapus, maka tetap berlaku terhadap paten lain. Setelah itu penerima lisensi tetap diwajibkan untuk tetap membayar royalti kepada pemegang paten yang patennya tidak dihapus.

Pada huruf d dan e, huruf d penghapusan paten dilakukan karena pada pelaksanaan paten tersebut ternyata tetap merugikan kepentingan masyarakat dan pada huruf e paten tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia. Akibat hukumnya bagi penerima lisensi adalah penerima lisensi tidak dapat lagi melaksanakan patennya lagi.

Pada pasal 133 juga dijelaskan bahwasanya gugatan penghapusan paten yang terdapat dalam pasal 132 hanya sebatas satu atau beberapa klaim atau bagian klaim. Sehingga paten yang akan dihapuskan hanya sebatas klaim yang digugat. Akibat hukumnya penerima lisensi tidak bisa menggunakan paten yang menjadi klaim untuk dihapuskan. Sedangkan untuk paten yang tidak termasuk dalam klaim tetap dapat digunakan.

2.3 Implikasi Yuridis Bagi Penerima Lisensi Akibat Putusan Komisi Banding Paten atau Pemegang Paten Tidak Memenuhi Kewajiban Membayar Biaya Tahunan.

Pada pasal 130 huruf c dan d UU Paten menjelaskan tentang alasan penghapusan yang dikarenakan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Ketentuan pembayaran biaya tahunan paten dan jangka waktu pelaksanaannya diatur dalam pasal 126 atau pasal 128 ayat (1).

Sebelum penghapusan paten dilakukan, menteri wajib memberitahu pemegang paten, penerima lisensi, atau kuasanya terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum paten dihapuskan. Terakhir paten yang dinyatakan telah dihapus haruslah dicatat dan diumumkan.

Implikasi yuridis dari penghapusan paten karena putusan banding komisi paten atau tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan bagi penerima lisensi adalah paten tersebut dianggap mati dan akan menjadi *public domain*. Sedangkan akibat hukum bagi penerima lisensi adalah penerima lisensi masih dapat menggunakan paten tersebut, karena paten tersebut telah menjadi *public domain*. Namun paten tersebut sudah tidak eksklusif lagi karena telah menjadi milik umum sehingga siapa saja berhak untuk menggunakannya.

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwasanya akibat hukum alasan penghapusan paten disebabkan oleh permohonan pemegang paten tidak menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi karena sebelum mengajukan penghapusan, pemegang paten harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penerima lisensi. Pada alasan penghapusan karena adanya gugatan, penerima lisensi tetap dapat melaksanakan patennya jika paten yang dihapuskan disebabkan paten tersebut sama dengan paten lain. Namun penerima lisensi tidak dapat melaksanakan patennya lagi apabila paten tersebut dihapus dengan alasan paten tersebut menyalahi ketentuan undang-undang. Pada alasan penghapusan paten karena pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, penerima lisensi tetap dapat melaksanakan patennya karena paten yang dihapuskan telah menjadi *public domain*.

B. Elemen-Elemen Penting Dalam Perjanjian Lisensi Yang Dapat Melindungi Penerima Lisensi dari Akibat Penghapusan Paten Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

1. Hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Membuat Perjanjian

Sebelum membahas mengenai perjanjian lisensi. Alangkah baiknya terlebih dahulu membahas mengenai perjanjian, karena seperti perjanjian pada umumnya perjanjian lisensi juga tidak lepas dari hal-hal yang secara umum dan mendasar yang menjadi acuan untuk membuat suatu perjanjian. Suatu perjanjian tidak dapat begitu saja dibuat tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Untuk membuatnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membuat suatu kontrak atau perjanjian. Kontrak atau perjanjian secara etimologis didefinisikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁵⁶

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵⁷ Dari definisi yang telah dijelaskan tersebut dapat dikatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu bentuk nyata dari suatu

⁵⁶ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005). H. 458.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 6.

peristiwa hukum. Perjanjian atau kontrak diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia.

Untuk membuat suatu perjanjian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti harus terpenuhinya syarat sah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dianggap sah. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri (*Consensus*);
- b. Cakap untuk membuat suatu kontrak (*Capacity*);
- c. Mengetahui suatu hal tertentu (*Certainty of Terms*);
- d. Suatu sebab yang halal (*Legality*)

Sepakat untuk mengikatkan diri mempunyai arti bahwa para pihak yang akan membuat perjanjian haruslah memiliki persesuaian kehendak antara pihak satu dengan pihak yang lain. Persetujuan tersebut harus bebas, tidak ada paksaan. Apabila persetujuan tersebut didasari karena ada paksaan. Maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah. Cakap untuk membuat suatu kontrak berarti para pihak haruslah cakap menurut hukum.

Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat suatu kontrak. Kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:⁵⁸

1. Orang yang belum dewasa.

⁵⁸ Lukman Santoso AZ, **Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis** (Malang: Setara Press, 2016), hlm 21.

2. Orang yang berada di bawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang telah melarang membuat kontrak-kontrak tertentu.

Adanya suatu hal tertentu memiliki maksud bahwa suatu kontrak haruslah memiliki objek. Objek yang dimaksud adalah objek yang jelas. Sehingga objek suatu perjanjian atau kontrak haruslah berupa barang yang cukup jelas atau hal tertentu.

Adanya sebab yang halal memiliki arti yaitu bahwa suatu perjanjian yang akan dibuat haruslah didasarkan sebab yang halal atau sebab yang tidak melanggar norma-norma maupun tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Dari uraian syarat sahnya perjanjian di atas, syarat sahnya perjanjian untuk sepakat untuk mengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu kontrak merupakan syarat subjektif, yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian.

Sedangkan untuk syarat mengetahui suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif. Apabila syarat objektif tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dikatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Dari penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sebelum membuat suatu perjanjian haruslah didasarkan pada syarat sahnya perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata. Untuk membuat sebuah kontrak yang baik haruslah didasarkan

pada prinsip-prinsip atau asas-asas yang terdapat di dalam perancangan kontrak. Pemakaian prinsip tersebut juga berlaku di dalam perjanjian lisensi. Erman Rajaguguk mengemukakan ada sepuluh dasar yang harus diperhatikan dalam kontrak-kontrak yang lazim digunakan di Indonesia dan patut menjadi perhatian perancang kontrak dagang internasional (Erman Rajaguguk, tt: 3-8). Kesepuluh hal itu meliputi: (1) penggunaan istilah, (2) prinsip kebebasan berkontrak, (3) prinsip penawaran dan penerimaan, (4) iktikad baik, (5) peralihan risiko, (6) ganti kerugian, (7) keadaan darurat, (8) alasan pemutusan, (9) pilihan hukum, dan (10) penyelesaian sengketa.

Disamping itu juga terdapat pendapat lain, Peter Mahmud juga mengemukakan bahwa ada dua prinsip yang harus diperhatikan di dalam mempersiapkan kontrak, yaitu (1) *beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, dan (2) *pacta sunt servanda* (Peter Mahmud, 2000: 17-19).⁵⁹*Beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy* yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Untuk menghindari ketidakjelasan maksud para pihak, maka langkah pertama yang mesti dilakukan oleh para pihak, yaitu menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka yang terlibat dan bertugas di dalam melakukan transaksi.⁶⁰ Sedangkan *pacta sunt servanda* memiliki pengertian bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak, misalnya salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak

⁵⁹H. Salim, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, **Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 62.

⁶⁰ Ibid. Hlm 62.

yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang lain membayar ganti rugi.⁶¹ Menurut penulis prinsip-prinsip tersebut haruslah diperhatikan karena dengan digunakannya prinsip-prinsip tersebut maka kontrak maupun perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak akan menjadi sebuah kontrak atau perjanjian yang ideal dan meminimalisir kerugian atau masalah yang mungkin timbul dari perjanjian yang telah dibuat tersebut.

2. Perjanjian Lisensi Yang Baik

Perjanjian lisensi Paten menjadi perjanjian yang sangat penting bagi penerima lisensi maupun pemberi lisensi itu sendiri. Perjanjian lisensi dapat digunakan sebagai payung hukum bagi kedua belah pihak apabila suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak terduga terjadi. Meskipun negara telah memberikan suatu payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tetapi undang-undang tersebut masih belum bisa memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada penerima lisensi. Salah satu hal yang tidak terduga yang mungkin saja terjadi adalah apabila terjadi suatu penghapusan paten. Penghapusan paten memiliki akibat hukum yang merugikan bagi penerima lisensi seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pembahasan pertama. Untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan suatu perjanjian lisensi yang dapat melindungi penerima lisensi. Tentu saja pembuatan perjanjian lisensi tersebut haruslah baik dan bisa menjadi payung hukum yang berisi klausula-klausula yang dapat menjadi perlindungan hukum preventif kelak apabila terjadi penghapusan paten.

⁶¹ Lukman Santoso, Op. Cit, hlm 25.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, membuat suatu perjanjian haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada perjanjian lisensi. Di dalam UU Paten terdapat larangan-larangan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam perjanjian lisensi. Seperti dalam Pasal 76. Pasal 76 menjelaskan bahwa perjanjian lisensi dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan yang diatur dalam pasal 19. Perjanjian lisensi berlaku pada jangka waktu yang telah ditentukan dan juga berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 78 menjelaskan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi. Pada pasal 79 menjelaskan tentang proses selanjutnya yaitu perjanjian lisensi harus dicatatkan dan diumumkan oleh menteri serta harus dikenai biaya. Apabila perjanjian lisensi tidak dicatatkan dan diumumkan maka perjanjian lisensi tidak memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Menteri berhak menolak pencatatan apabila perjanjian lisensi memuat ketentuan yang dimaksud dalam pasal 78. Selain membuat perjanjian didasarkan pada prinsip dan asas-asas tertentu, pembuatan perjanjian lisensi juga harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Bentuk perjanjian lisensi memiliki bentuk yang berbeda-beda, mengingat isi perjanjian bisa ditentukan bebas oleh para pihak yang akan membuat perjanjian. Adalah tidak mungkin untuk menyusun suatu standar kontrak atau *model* dari suatu bentuk kontrak yang dapat berlaku untuk segala macam perjanjian. Jika dipersiapkan juga suatu *model perjanjian*, model inipun hanya

dipakai sebagai pedoman saja, yang isinya pun tentunya tidak terbatas pada model itu saja, jadi dapat ditambah, tergantung kepada tipe dari perjanjian itu sendiri, atau mungkin juga beberapa ketentuan tidak dipakai, dengan demikian pula halnya dengan perjanjian lisensi yang tersedia pula beberapa model kontrak.⁶² Tidak ada standart baku untuk membuat suatu perjanjian lisensi, karena suatu perjanjian lisensi memiliki kriteria-kriteria kesepakatan yang berbeda yang digunakan oleh para pihak yang akan membuat suatu perjanjian. Namun, terdapat model yang umum yang biasanya dijadikan acuan seperti membuat perjanjian-perjanjian lain pada umumnya.

2.1 Bentuk Dari Perjanjian Lisensi

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya perjanjian lisensi tidak memiliki suatu bentuk baku. Namun sebagai pedoman ada beberapa hal yang dapat disebutkan di bawah ini sebagai bentuk dari sebuah perjanjian lisensi.⁶³

Bagian Pertama : berisikan tipe dari perjanjian itu sendiri, dalam hal ini perjanjian lisensi dari paten, merek, *utility* model, desain produk industri atau kombinasi dari yang tersebut diatas atau *know-know* dan lain-lain.

Bagian Kedua : nama dan alamat yang jelas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan biasanya disebut secara singkat saja. Apa yang diperjanjikan (dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *Whereas Clause*). Definisi pengertian-pengertian dari istilah-istilah

⁶²Ita Gambiro, "Perjanjian Lisensi dan Perjanjian Bantuan Teknik(*Technical Assistance*)*" Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN, Desember 1990, hlm 582.

⁶³Ibid. Hlm 588

yang berulang kali dipakai di dalam kontrak tersebut atau istilah-istilah yang harus diuraikan. Bagian ini dapat juga disebut : Preamble atau Recital dari kontrak.

Bagian Ketiga : Bagian ini sebetulnya merupakan "batang tubuh (*Body*)" dari suatu kontrak/perjanjian itu sendiri yang berisikan ketentuan-ketentuan operatif (*operative clauses*).

Pada umumnya isinya menyangkut antara lain:

1. Informasi, *know-how*, jasa
 - Teknis.
 - Komersial
2. Mutu, supervisi
3. Perlindungan Perlindungan Paten
4. Merek
5. Kewajiban-kewajiban dari si penerima lisensi
6. Remunerasi dari si pemberi lisensi
 - royalty
 - fee
 - cara pembayaran
7. Pengalihan dan sub-lisensi
8. "*Boiler Plates*"
9. Ketentuan Umum.

Bagian Keempat : Bagian ini adalah merupakan bab penutup atau disebut juga "*Implementing Provisions*" yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian dibuat dalam berapa rangkap, dan berapa rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan jika kontrak dibuat dalam dua Bahasa harus dinyatakan bahasa mana yang dianggap "resmi" yang berarti jika ada keraguan dalam menginterpretasikan suatu ketentuan/provision maka yang berlaku adalah teks dari bahasa resmi tersebut.
2. Pernyataan kapan mulai berlakunya kontrak/surat perjanjian yang bersangkutan, dengan penandatanganan kontrak tersebut akan mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Penandatanganan dihadiri oleh saksi-saksi, dibawah tanda tangan dibutuhkan dengan nama yang jelas.

Dari penjabaran mengenai bentuk perjanjian lisensi diatas dapat diketahui bahwa perjanjian lisensi secara umum terbagi menjadi empat bagian. Bagian-bagian tersebut sudah dijelaskan dalam uraian diatas. Untuk membuat suatu perjanjian lisensi yang baik. Setidaknya harus memenuhi kriteria dari empat bagian perjanjian lisensi tersebut. Tidak lupa ketentuan-ketentuan yang berasal dari undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Paten yang memuat ketentuan maupun larangan yang harus terdapat dalam perjanjian lisensi juga harus ikut menjadi pertimbangan bagi kedua belah pihak yang harus dimasukkan kedalam perjanjian lisensi.

Untuk menyusun sebuah perjanjian lisensi, hak-hak bagi para pihak haruslah diperhatikan. Hak-hak tersebut harus tercantum dalam perjanjian lisensi dan juga materi perjanjian yang akan disepakati. Agar hak-hak dan materi tersebut tidak terlewatkan, alangkah baiknya para pihak terlebih dahulu membuat suatu *checklist*.⁶⁴

2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Lisensi

Secara umum, pemegang paten sebagai pihak yang disebut sebagai pemberi lisensi, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian lisensi. Yaitu, untuk membuat atau memberikan hak yang telah dilisensikan tersedia bagi penerima lisensi dan untuk memelihara hak tersebut dalam keadaan baik. Sedangkan rincian mengenai perjanjian lisensi bergantung pada kesepakatan para pihak dalam menentukan isi dari rincian perjanjian lisensi. Karena para pihak mempunyai hak “kebebasan dalam mengadakan kontrak” dan para pihak sebelum membuat perjanjian harus didasarkan pada “itikad baik”. Secara umum kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat diejelaskan sebagai berikut:⁶⁵

1. Kewajiban pemberi lisensi untuk menjadikan hak yang dilisensikan tersedia berarti bahwa pemberi lisensi harus membuat penemuan atau hak lain yang dilisensikan itu tersedia bagi penerima lisensinya dan

⁶⁴Suatu daftar yang berisikan checkpoints yaitu hal-hal materi yang akan dan seharusnya dicantumkan didalam suatu kontrak sesuai dengan macam kontrak yang akan dibuat.

⁶⁵Insan Budi Maulana, **Lisensi Paten**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 16.

tidak boleh mencegah penerima lisensi dalam menggunakan hak yang dilisensikan.

2. Kewajiban pemberi lisensi untuk menjaga agar hak yang dilisensikan dalam keadaan baik berarti bahwa pemberi lisensi harus menjaga kerahasiaan keterangan teknik yang dilisensikan seorang pemberi lisensi atas permintaan paten yang belum diputuskan oleh Kantor Paten atau masih dalam tahap pemeriksaan berkewajiban untuk mengurus penyelesaian permintaan paten yang dicakup dalam perjanjian lisensi dan untuk mempertahankannya terhadap keberatan-keberatan atau oposisi-oposisi pihak lain terhdapnya. Selain itu, pemberi paten juga harus menjelaskan bahwa paten yang dilisensikan masih berlaku atau belum berakhir masa berlakunya.
3. Kewajiban lain dari penerima lisensi adalah bahwa pemberi lisensi harus menjamin bahwa paten tersebut dapat digunakan dan secara teknik memungkinkan untuk mengoperasikan atau menghasilkan proses dan/atau hasil yang dipatenkan.

Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi bergantung pada isi dari perjanjian lisensi tersebut. Namun, ada beberapa macam kewajiban yang biasanya ada dalam perjanjiannya⁶⁶:

1. Kewajiban yang biasanya diatur dalam undang-undang.
2. Kewajiban yang diatur oleh kesepakatan para pihak.
3. Kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan.

⁶⁶Ibid. Hlm 23.

Pertama, kewajiban yang diatur dalam undang-undang, berarti segala kewajiban yang diatur dalam UU Paten. Beberapa kewajiban penerima lisensi yang diatur dalam UU Paten, misalnya kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti. Atau, penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub-lisensi dengan pihak ketiga tanpa izin dari pemberi lisensi, dan sebagainya.

Kedua dan ketiga, yaitu berapa jumlah royalti yang harus dibayar biasanya tidak diatur dalam undang-undang karena klausula ini akan diatur oleh para pihak yang akan membuat perjanjian. Dalam hal ini penerima lisensi mempunyai kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Kewajiban lain bagi penerima lisensi adalah untuk menjaga kendali mutu atas barang-barang yang diproduksi atau menggunakan proses yang dipatenkan.

2.3 Klausula yang dibutuhkan dalam Perjanjian Lisensi Guna Melindungi Penerima Lisensi dari Penghapusan Paten Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Bagian paling penting dari sebuah perjanjian adalah isi dari perjanjian tersebut, termasuk dalam perjanjian lisensi paten. Karena dalam isi perjanjian tersebut para pihak yang akan membuat perjanjian dibebaskan untuk menentukan isi dari perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak berhak untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Para pihak berhak untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, persyaratan, maupaun klausula-klausula yang dianggap penting bagi kedua belah pihak agar suatu perjanjian tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang, dan apabila di masa yang akan datang terjadi hal yang

merugikan salah satu pihak sehingga terjadi gugatan. Maka perjanjian yang telah dibuat dapat menjadi payung hukum yang dapat menyelamatkan pihak yang dirugikan, khususnya dalam kasus ini, penerima lisensi menjadi pihak yang paling sering dirugikan akibat dari adanya penghapusan paten. Kerugian tersebut dapat diminimalisir atau dihindari dengan membuat isi perjanjian yang ideal dengan menambahkan klausula-klausula yang dianggap perlu bagi penerima lisensi untuk menghindari kerugian atas penghapusan paten.

Di sini penulis ingin memberikan suatu saran klausula-klausula yang dianggap perlu dicantumkan dalam perjanjian lisensi paten guna melindungi penerima lisensi akibat adanya penghapusan paten. Klausula tersebut adalah *boilerplate clauses*. *Boilerplate clauses* mempunyai pengertian sebagai berikut:⁶⁷

Clauses that usually appear at the end of a contract. Sometimes they are referred to as the "miscellaneous" clauses. Such term refers to the relatively standardised clauses in contracts, which are often agreed with little or no negotiation and found towards the end of an agreement. While perhaps not as commercially sensitive as other terms in a contract and consequently often overlooked, they nevertheless perform a valuable and useful purpose in a contract. Most boilerplate clauses clarify the relationship between the contracting parties. Generally, subject to statutory restrictions and illegality. By including boilerplate clauses, the parties to a contract can better define the relationship between themselves, which provides certainty if terms in the contract are ever disputed. Examples of boilerplate clauses are: entire agreement, no representation, or third party rights.

Dari penjelasan mengenai pengertian *boilerplate clauses* tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dengan memasukkan klausula *boilerplate* maka pihak-pihak dalam sebuah kontrak atau perjanjian dapat mendefinisikan lebih baik hubungan diantara mereka yang memberikan

⁶⁷<https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/boilerplate-clauses/>
diakses pada 24 Julis 2018

kepastian kepada para pihak yang membuat perjanjian apabila ketentuan-ketentuan dalam perjanjian atau kontrak pernah diperdebatkan. *Boilerplate clauses* sering digunakan dalam kontrak-kontrak internasional, yang mana dalam perjanjian lisensi para pihaknya juga salah satu pihaknya juga sering berasal dari pihak luar negeri. Maka penulis merasa *boilerplate clauses* ini sangat perlu untuk dimasukkan dalam perjanjian lisensi guna menyelamatkan penerima lisensi apabila terjadi suatu penghapusan paten. Contoh-contoh dari boilerplates atau klausul-kalusul standar adalah sebagai berikut:

1. Pilihan forum
2. Severability clause
3. Integration atau merge clause
4. Assignment clause,
5. Notice
6. Force majeure,
7. Hardship clause,
8. Survivability clause
9. Dispute settlement clause
10. Pilihan hukum

Dari berbagai macam klausula standar di atas, ada beberapa klausula yang menurut penulis penting untuk dimasukkan kedalam perjanjian lisensi. Yaitu:

1. Pilihan forum

Pilihan forum adalah klausula yang memuat kesepakatan para pihak dalam kontrak untuk menetapkan domisili dari kontrak mereka dan/atau pengadilan yang disepakati untuk menjadi tempat pengajuan sengketa yang mungkin timbul dari kontrak. Klausula ini menjadi penting untuk digunakan karena dengan adanya klausula ini para pihak sudah mempersiapkan suatu tempat untuk menyelesaikan sengketa apabila dikemudian hari ada sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat. Karena bisa saja dengan adanya penghapusan paten akan berakibat kepada kerugian terhadap penerima lisensi. Maka apabila kerugian tersebut terjadi, maka penerima lisensi ataupun pemegang lisensi tidak harus memikirkan kembali dimana mereka akan menyelesaikan sengketanya, karena dari awal sudah ditentukan melalui klausula pilihan forum.

2. *Force majeure*

Klausula ini menjelaskan bahwasanya pasal dalam kontrak yang memungkinkan salah satu pihak untuk tidak melaksanakan prestasinya, seandainya pelaksanaan prestasi itu terhambat atau tidak mungkin dilaksanakan sebagai akibat dari munculnya peristiwa-peristiwa tertentu yang berada di luar kendali pihak tersebut untuk mencegahnya. Peristiwa penghapusan paten dapat dianggap sebagai peristiwa yang berada diluar kendali para pihak. Paten dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan UU Paten dengan alasan-alasan yang sudah penulis jelaskan pada rumusan masalah pertama. Klausula ini berguna ketika terjadi penghapusan paten, maka penerima lisensi tidak wajib

melaksanakan lagi prestasinya. Seperti penerima lisensi tidak wajib lagi untuk membayar biaya royalti atas paten yang telah dilisensikannya, karena paten yang dihapuskan tidak lagi berlaku.

3. *Hardship Clause*

Yaitu pasal dalam kontrak yang memungkinkan salah satu pihak untuk menuntut pihak lain (melalui atau tidak melalui pengadilan) untuk melaksanakan renegotiasi dan perubahan atas persyaratan kontrak, apabila timbul perubahan-perubahan keadaan yang sedemikian rupa sehingga kedudukan kontraktual (*bargaining position*) para pihak menjadi sangat tidak seimbang di luar batas-batas kewajaran. Penerima lisensi seringkali menjadi pihak yang memiliki kedudukan kontraktual yang lebih rendah dari pemegang paten. Hal ini dikarenakan penerima lisensi kurang memiliki pengetahuan atau informasi yang cukup untuk menciptakan sebuah kontrak atau perjanjian lisensi. Oleh sebab itu klausula ini sangat penting untuk dimasukkan dalam perjanjian lisensi, agar para pihak yang akan membuat perjanjian benar-benar memiliki *bargaining position* yang seimbang. Dan apabila suatu saat terjadi ketidak seimbangan kedudukan diantara keduanya, seperti akibat adanya penghapusan paten. Maka, penerima lisensi dapat menuntut pihak pemegang lisensi.

4. Pilihan Hukum

Klausula ini (di dalam kontrak-kontrak internasional) yang memuat kesepakatan para pihak tentang hukum negara mana atau sumber hukum apa yang digunakan untuk mengatur dan menentukan pembentukan, keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan kontrak. Perjanjian lisensi paten adalah perjanjian yang terkadang melibatkan pihak dari luar negeri. Maka klausula ini sangatlah

penting untuk digunakan. Para pihak haruslah menyepakati hukum mana yang akan dipakai, sehingga memiliki dasar hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.

Untuk menghindari kerugian akibat adanya penghapusan paten sebagai langkah preventif, penerima lisensi ketika membuat suatu perjanjian dengan pemegang paten dapat membuat kesepakatan apabila disuatu hari paten yang dilisensikan mengalami penghapusan, maka pemegang paten bertanggung jawab penuh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Sehingga penerima lisensi tidak mengalami kerugian atas penghapusan paten yang terjadi.

Penerima lisensi juga bisa membuat kesepakatan dengan pemegang paten dalam perjanjian lisensi apabila paten yang dihapuskan sewaktu-waktu mengalami penghapusan, maka penerima lisensi berhak untuk menarik kembali semua royalti yang telah dibayarkan.

Hal yang lebih penting untuk diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah bagaimana penyelesaian sengketa yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa dikemudian hari karena adanya penghapusan paten. Para pihak dalam perjanjian lisensi dapat memilih bentuk penyelesaian apa yang akan ditempuh, yaitu litigasi maupun non litigasi.

3. Penyelesaian Sengketa atas Paten yang Telah Dihapuskan

Manusia di samping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu (pribadi). Artinya, sudah menjadi kodrat manusia, dalam hidupnya selalu bergaul dan berkumpul serta hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam suatu tempat (wadah) dan waktu tertentu yang disebut masyarakat. Dalam masyarakat manusia saling mengadakan hubungan dan kerjasama

(interaksi) antara manusia yang satu dengan lainnya. Hubungan ini muncul sejak manusia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sepanjang sejarah belum ada manusia yang dapat hidup terpisah dengan manusia lain, kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya, sedang menjalani hukuman atau pengasingan. Itulah sebabnya filosof terkenal Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah mahluk sosial.⁶⁸

Dalam hubungan sosial ini, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan-perselisihan atau pertentangan-pertentangan di antara sesama manusia, mengingat beragamnya kebutuhan manusia dan banyaknya jumlah manusia yang sama-sama menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut. Lebih-lebih mengingat manusia sebagai mahluk individu, mereka lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, atau bahkan merugikan kepentingan orang lain. Apabila hal ini terjadi, maka dapat menimbulkan kekacauan-kekacauan dalam pertentangan-pertentangan di antara sesama manusia, sehingga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat tidak dapat terwujud.⁶⁹

Kekacauan-kekacauan maupun pertentangan yang terjadi di antara sesama manusia dapat menimbulkan sengketa sehingga terjadi ketidaktertiban dan kekacauan di masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut untuk tercapainya ketertiban di masyarakat. Sengketa yang terjadi haruslah diselesaikan oleh para pihak itu sendiri. Untuk menyelesaikan suatu sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah penyelesaian

⁶⁸M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011, hlm 2.

⁶⁹Ibid, hlm 4.

sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan.⁷⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas, suatu sengketa terjadi karena adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain. Sengketa yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sengketa yang timbul dari akibat penghapusan paten. Penghapusan paten dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, salah satunya adalah penerima lisensi. Akibat dari penghapusan paten tersebut dapat menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang bersumber dari paten yang telah dihapuskan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi, UU Paten tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa akibat penghapusan paten yang ditujukan kepada penerima lisensi untuk menuntut ganti rugi atas penghapusan paten. Dalam UU Paten, penyelesaian sengketa diatur dalam BAB XIII. Dalam bab tersebut dijelaskan pada Pasal 142 bahwa gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan niaga adalah para pihak yang berhak menerima paten dapat menuntut pihak lain selain dari pihak yang menerima paten. Sedangkan untuk

⁷⁰ Jimmy Joses Sembiring, **Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)**, Jakarta, Visi Media, 2011, hlm 9.

gugatan ganti rugi, pada Pasal 143 pemegang lisensi atau penerima lisensi hanya dapat melakukan gugatan terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 19 ayat (1).

UU Paten tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan, namun bukan berarti penerima lisensi tidak dapat melakukan gugatan ke pengadilan apabila terjadi penghapusan paten. Penerima lisensi tetap bisa melakukan gugatan ke pengadilan dengan menggunakan dalil lain yang sesuai dengan hukum acara perdata.

3.1 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian bisa terjadi karena wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Begitu juga dalam perjanjian lisensi, apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasinya dalam perjanjian lisensi maka dapat juga mengakibatkan wanprestasi. Dalam sebuah perjanjian lisensi yang dibuat antara penerima lisensi dengan pemegang lisensi terdapat kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi, misalnya kesepakatan yang dibuat apabila terjadi penghapusan paten maupun penggunaan lisensi yang akan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun, ditengah-tengah perjalanan penggunaan lisensi paten ternyata paten tersebut harus dihapuskan karena suatu alasan tertentu yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dan menimbulkan kerugian. Pihak tersebut disini adalah

penerima lisensi. Atas dasar tersebut penerima lisensi dapat melakukan gugatan kepada pengadilan atas dalil wanprestasi.

Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi.⁷¹ Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah membuat perjanjian. Sehingga suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan. Wanprestasi adalah perkara yang termasuk dalam hukum perdata, sehingga penyelesaian sengketa wanprestasi haruslah sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Sehingga pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan perkara wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Selain melalui jalur litigasi penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara non litigasi atau di luar pengadilan, penyelesaian sengketa diluar pengadilan biasa disebut dengan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

⁷¹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho13616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

Pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *alternatif dispute resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan sesuatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu.⁷²

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Para pihak yang bersengketa tidak harus menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan. Namun, para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara perdamaian maupun arbitrase. Di dalam Pasal 153 UU Paten juga dijelaskan bahwasanya para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Menurut penjelasan Pasal 153 yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

⁷² Susanti Adi Nugroho, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015, hlm 1.

1. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: “mediate” yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.⁷³

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, melainkan para pihak yang bersengketa.⁷⁴

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaiannya itu.

⁷³ Syahrizal Abbas, **Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional**. Jakarta, Kencana, 2009, hlm 1-2.

⁷⁴ Rachmadi Usman, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 24.

Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian, sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock, stalemate*). Situasi ini yang membedakan mediasi dan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa, karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.⁷⁵

Dari pengertian di atas, mediasi dapat dijadikan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh penerima lisensi dan pemegang paten untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi akibat dari penghapusan paten. Para pihak dapat menggunakan atau melibatkan mediator sebagai pihak ketiga untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah, mediator hanya berperan sebagai fasilitator atau mengatur jalannya mediasi antara kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, namun mediator harus bersikap netral dan tidak boleh menjadi pihak yang mengambil keputusan. Mediator tidak boleh memberi saran apapun terkait masalah yang terjadi diantara para pihak. Keputusan tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa yaitu penerima lisensi dengan pemegang paten.

2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana disebut di dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan

⁷⁵ Takdir Rahmadi, **Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

cara melalui musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan akibat-akibat hukum timbul dari suatu putusan pengadilan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai perdamaian, konsiliasi dapat dilakukan untuk mencegah proses litigasi dalam setiap tingkat peradilan, kecuali putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan konsiliasi.

Dalam konsiliasi ada konsiliator yang bertugas sebagai fasilitator dalam hal melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa. Konsiliator kurang lebih tugasnya adalah memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan-pesan dari salah satu pihak ke pihak lainnya terutama apabila tidak mungkin disampaikan secara langsung atau para pihak tidak bersedia bertemu muka secara langsung.⁷⁶

Selain mediasi, para pihak yaitu penerima lisensi dan pemegang paten dapat juga menyelesaikan sengketanya dengan cara konsiliasi. Konsiliasi hampir mirip dengan mediasi yaitu sama-sama melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator, namun disini fasilitator mempunyai hak untuk mengusahakan solusi-solusi atau memberikan saran untuk penyelesaian masalah bagi kedua pihak. Namun keputusan akhir tetap berada pada kesepakatan kedua belah pihak.

3. Negosiasi

Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar menawar harga, gaji, dan lain sebagainya.

⁷⁶ Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 314.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi secara umumnya adalah adalah suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.⁷⁷

Secara sederhana, definisi dari negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian jalan keluar atas suatu masalah yang berlangsung.⁷⁸

Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu iktikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam hal kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun, demikian, jika para pihak dapat duduk secara bersama-sama dengan iktikad baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan menjadi suatu metode APS yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).⁷⁹

Penerima lisensi dan pemegang paten juga dapat menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi, berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, negosiasi dilakukan sendiri oleh kedua belah pihak dengan itikad baik untuk mencari jalan keluar akan masalah yang terjadi. Negosiasi ini tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi, para pihak yaitu penerima lisensi dan pemegang paten

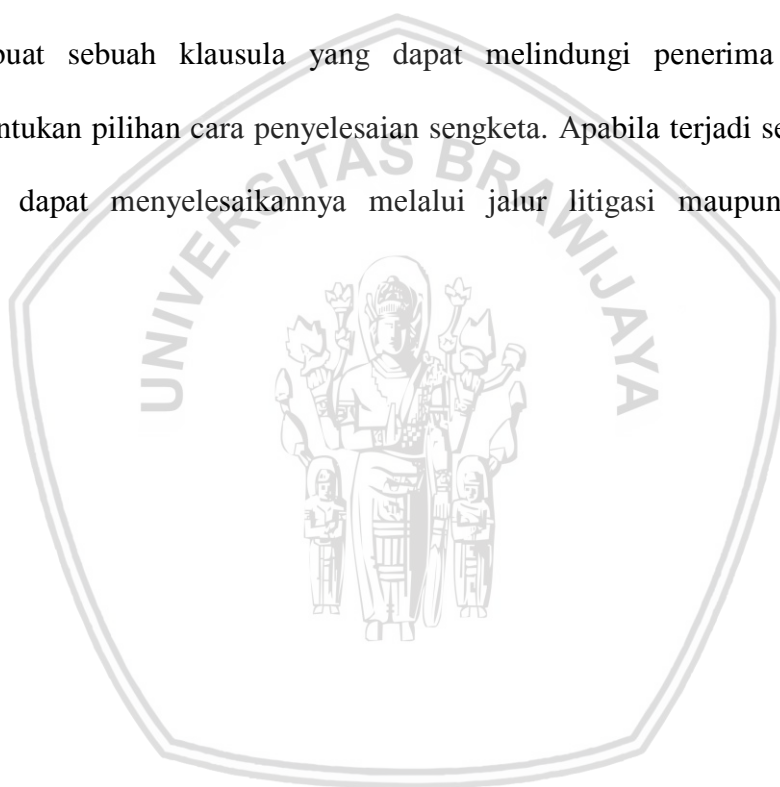
⁷⁷Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 24.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid. Hlm, 26.

sendiri lah yang melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi akibat penghapusan paten.

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan bahwasanya elemen-elemen yang harus ada dalam perjanjian lisensi yang dapat melindungi penerima lisensi dari akibat hukum penghapusan paten adalah dalam membuat suatu perjanjian lisensi haruslah didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian yang berlaku, memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, membuat sebuah klausula yang dapat melindungi penerima lisensi dan menentukan pilihan cara penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa, para pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa perbedaan akibat hukum penghapusan paten bagi penerima lisensi yang disebabkan karena perbedaan alasan penghapusan. Akibat hukum bagi penerima lisensi dengan alasan penghapusan paten disebabkan oleh permohonan pemegang paten tidak menimbulkan kerugian bagi penerima lisensi. Pada alasan penghapusan karena adanya gugatan, penerima lisensi tetap dapat melaksanakan patennya jika paten yang dihapuskan disebabkan paten tersebut sama dengan paten lain. Namun penerima lisensi tidak dapat melaksanakan patennya lagi apabila paten tersebut dihapus dengan alasan paten tersebut menyalahi ketentuan undang-undang. Pada alasan penghapusan paten karena pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, penerima lisensi tetap dapat melaksanakan patennya karena paten yang dihapuskan telah menjadi *public domain*.
2. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam perjanjian lisensi adalah dalam membuat perjanjian haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas perjanjian yang berlaku, memperhatikan hak dan kewajiban para pihak, memperhatikan isi dari perjanjian lisensi dengan membuat klausula yang dapat menyelamatkan penerima lisensi dari akibat

hukum penghapusan paten yang ditimbulkan, serta cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih apabila suatu saat terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa akibat penghapusan paten dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan mendaftarkan suatu invensi sebaiknya memastikan bahwa invensi yang didaftarkan tersebut adalah hasil penemuannya sendiri yang baru dan tidak menyalahi aturan undang-undang yang berlaku sehingga tidak merugikan pihak lain di waktu yang akan datang.
2. Untuk pihak yang ingin mendapatkan lisensi paten, sebaiknya mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana membuat perjanjian lisensi yang ideal sehingga tidak menimbulkan kerugian di waktu yang akan datang.
3. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan pelanggaran paten yang terjadi, serta sangat perlu untuk memberi penyuluhan atau pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat tentang isi UU Paten.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amiruddin Pabbu dan Syamsuddin, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Mitra Wacana Media 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka. 2005). H. 458.
- Endang Purwaningsih, **Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 27.
- Farida Hasyim, **Hukum Dagang**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional**. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- H. Salim, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, **Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Insan Budi Maulana, **Lisensi Paten**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ishaq, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Iswi Hariyani. **Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang benar**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ita Gambiro, **“PERJANJIAN LISENSI DAN PERJANJIAN BANTUAN TEHNIK (TECHNICAL ASSISTANCE)*”** Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN, *Desember 1990*.
- Jimmy Joses Sembiring, **Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)**, Jakarta, Visi Media, 2011.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam**, UIN-Maliki Press, 2013.
- Lukman Santoso AZ, **Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis** (Malang: Setara Press, 2016).
- M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi**, UB Press, Malang, 2011.
- M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, (Bandung: Alumni, 1986).



- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, **Hak Milik Intellectual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ni'matul Huda, **Ilmu Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Patrik Purwahid, **Dasar-dasar Hukum Perikatan**, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007.
- Rachmadi Usman, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyrights Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ratna Artha Windari, **Hukum Perjanjian**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Masalah-masalah Hukum**, No. 1-6 Tahun X/10, 1993.
- Sophar Maru Hutagalung, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Susanti Adi Nugroho, **Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya**, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, **Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis**, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Syahmin AK, **Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Syahrizal Abbas, **Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional**. Jakarta, Kencana, 2009.
- Takdir Rahmadi, **Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zainal Asikin, **Hukum Dagang**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

INTERNET

Asep Herman Suyanto, *Peran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Dunia Pendidikan*, <http://www.asep-hs.web.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 19 Juli 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2018

<https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/boilerplate-clauses/> diakses pada 24 Juli 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57aebff434001/ini-mekanisme-penghapusan-hak-paten> diakses Pada 21 Mei 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

